

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Berita | : Potensi PAD Tak Tergali Optimal |
| Entitas / Cakupan | : Kota Bandung |
| Sumber / Hal | : Pikiran Rakyat / Hal.2 |
| Edisi | : Kamis, 20 September 2018 |

Potensi PAD Tak Tergali Optimal

BANDUNG, (PR).-

Salah satu pekerjaan rumah pasangan Wali Kota Bandung Oded M Danial dan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana adalah masih belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak reklame dan retribusi parkir merupakan dua potensi PAD yang paling bermasalah.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama mengungkapkan, sebagai kota besar, Bandung memiliki potensi PAD yang luar biasa besar. Sayangnya, banyak potensi pendapatan belum tergarap baik. Ia menyoroti lemahnya kemauan politik untuk mengeksekusi kebijakan dan aturan.

"Potensi pendapatan dari pajak dan retribusi luar biasa besar. Sa-

yangnya, belum ada kemauan politik yang cukup kuat untuk membuatnya optimal. Ini yang jadi pekerjaan rumah besar pemimpin baru," tutur Aan, Rabu (19/9/2018) siang.

Ia mencontohkan, apa yang terjadi dalam pengelolaan pajak reklame dan retribusi parkir selama lima tahun terakhir. Peraturan daerah baru tentang reklame masih belum berhasil diterjemahkan dalam perbaikan pengelolaan di lapangan. Selain masih banyaknya reklame ilegal, besaran PAD yang didapat setelah perda disahkan belum juga menunjukkan peningkatan.

Menurut Aan, dengan memiliki perda, Pemkot Bandung mestinya bisa lebih leluasa mengelola reklame. Namun, lemahnya kemauan politik, membuat potensi PAD yang besar melayang.

"Pajak reklame masih menjadi masalah besar. Bandung mestinya bisa bersaing dengan Surabaya yang bisa memperoleh Rp 140 miliar per tahun. Buruknya koordinasi antar-SKPD ma-

sih menjadi masalah utama," ucapnya.

Terkait retribusi parkir, Aan menyoroti belum optimalnya pengelolaan mesin parkir. Infrastruktur baru senilai puluhan miliar rupiah yang dibeli dengan uang APBD itu masih belum bisa mendongkrak pendapatan. Bahkan, sebagian mesin parkir diketahui sama sekali tidak difungsikan. "Dewan sudah menyokong kemauan pemkot mengoperasikan mesin parkir lewat penganggaran. Ratusan mesin sudah ada. Tinggal sekarang keseriusan pemkot saja," ujarnya.

Menurut Aan, pengelolaan mesin parkir membutuhkan perencanaan dan disiplin yang kuat. Program ini merupakan kerja panjang mengubah kebiasaan warga.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Ema Sumarna optimistis target pajak tahun 2018 senilai Rp 2,6 triliun tercapai. Namun, pada saat yang sama, ia juga menyampaikan masih belum optimalnya pencapaian pajak reklame.

Pemkot mulai menerapkan kebijakan memungut pajak pada titik-titik reklame ilegal. Namun, kebijakan ini dipastikan bakal belum mampu mendongkrak capaian pajak reklame di akhir tahun hingga memenuhi target yang ditetapkan lebih dari Rp 100 miliar.

Air tanah

Aan Andi Purnama secara khusus menyoroti dilema pajak air tanah. Ia berpendapat, pemkot harus memikirkan untuk secepatnya menaikkan tarif pajak air tanah demi perlindungan kawasan dari eksploitasi berlebih. Penaikan tarif dibarengi ketegasan menindak pelanggaran izin.

Sejak 2014, Pemkot Bandung menetapkan besaran pajak air tanah Rp 5.000 per kubik. Sebelumnya, selama sekitar 20 tahun tarif pajak air tanah dipatok Rp 500 per kubik. Dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Jakarta dan Surabaya, tarif pajak air tanah di Bandung tergolong paling murah. **(Tri Joko Her Riadi)*****